



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: <b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 01 Februari 2016.</b>
Pukul	: <b>10.00WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr.H.Abdul Kharis AlMasyhari/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Kesiapan pelaksanaan APBN 2016;</b> <b>2. Persiapan Ujian Nasional 2016;</b> <b>3. Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan Program DAK Pendidikan;</b> <b>4. Rencana Penerapan Kurikulum Nasional;</b> <b>5. Penyelesaian Guru Honorer dan Ujian Komprehensif Kompetensi Guru;</b> <b>6. Lain-Lain.</b>
Hadir	: 36 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.10WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Dr.Abdul Kharis Al Masyhari, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

**A. Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2016**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap APBN TA 2015 Kemendikbud per 31 Desember 2015 yang mencapai 94.30% dan melampaui target semula dari 93%. Selanjutnya Komisi X DPR RI mengharapkan

Kemendikbud RI untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian tersebut.

2. Komisi X DPR RI menilai bahwa kesiapan pelaksanaan APBN TA 2016 Kemendikbud RI masih belum menyampaikan laporan secara terinci sampai dengan sub kegiatan, yang selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah raker ini.

#### **B. Persiapan Ujian Nasional 2016**

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan kesiapan sarana prasarana UN khususnya yang menggunakan metode BK (*Berbasis Komputer*) serta menambah secara signifikan jumlah sasaran yang melaksanakan UN BK pada tahun 2017.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk memastikan hasil UN dapat menjadi pertimbangan dalam proses seleksi mahasiswa baru PTN/PTS.
3. Terkait masih banyak satuan pendidikan yang belum memahami Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi.

#### **C. Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan Program DAK Pendidikan**

1. Terkait berbagai permasalahan pelaksanaan DAK TA 2015, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi dan koordinasi secara intensif dengan K/L lain, BPKP dan Pemerintah Daerah agar realisasi DAK pada TA 2016 dapat terserap sesuai target.
2. Terhadap alokasi DAK TA 2010-2013 yang belum terserap sekitar Rp.10T, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI mengenai penggunaan DAK Pendidikan tersebut.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera membuat analisa mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan DAK Pendidikan.

#### **D. Rencana Penerapan Kurikulum**

Terkait evaluasi Kemendikbud RI terhadap pelaksanaan K-13, Komisi X DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Perbaiki K-13 yang meliputi materi Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan isi buku dengan memperhatikan standar nasional pendidikan, minimal Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses (SP), dan Standar Penilaian (SP). Hasil perbaikan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan dan dapat terlaksana sesuai target.

- b. Memastikan seluruh sumber daya manusia telah siap melaksanakan K-13 pada tahun 2019 sesuai tahapan yang telah direncanakan, dan tidak memaksakan jika seluruh tahapan tersebut belum tercapai.

#### **E. Penyelesaian Guru Honorer dan Ujian Kompetensi Guru**

1. Terkait permasalahan guru honorer, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyampaikan data secara komprehensif mengenai permasalahan guru honorer dalam waktu dekat. Data tersebut menjadi bahan kajian Komisi X DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas hal tersebut.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk segera menyerahkan hasil evaluasi Uji Kompetensi Guru (UKG) kepada Komisi X DPR RI dalam waktu dekat. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan kajian Komisi X DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas hal tersebut.

#### **F. Lain-lain**

1. Komisi X DPR RI mendukung langkah-langkah Kemendikbud RI untuk penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam bentuk penanggulangan, pemberian sanksi dan pencegahan yang tertuang dalam Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
2. Terkait Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI agar NPD dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan pendidikan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Terkait permasalahan daerah terdampak asap, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan pelaksanaan proses belajar mengajar dan Ujian Nasional 2016 berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan khususnya standar sarana dan prasarana sebagaimana diamanahkan pada PP No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 angka 9.
4. Terkait pembahasan permasalahan perfilman nasional akan dilakukan pendalaman tersendiri dalam Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
5. Kemendikbud RI diminta untuk memberikan seluruh jawaban secara tertulis dari pertanyaan yang disampaikan setiap anggota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah raker ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.45 WIB

MENDIKBUD RI,



ANIES BASWEDAN

KETUA RAPAT,



Dr.H.ABDUL KHARIS ALMASYHARI